

INTISARI

Pelaksanaan sistem desentralisasi yang mengedepankan prinsip otonomi daerah telah menuntut semua pihak untuk dapat melakukan perubahan disegala sektor. Otonomi daerah juga telah memberikan kewenangan yang sangat besar bagi daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah pemerintah daerah dituntut dapat menjalankan fungsi, peran dan tanggungjawabnya dengan baik. Sebagai suatu daerah otonom, Pemerintah Kota Baubau juga berusaha untuk meningkatkan kemajuan daerahnya melalui pelaksanaan kegiatan pembangunan yang terencana dan terukur.

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan bangunan (IMB) di Kota Baubau dalam Perspektif *Good Governace* tahun 2012 dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Baubau, sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Baubau dalam perspektif *good governance* tahun 2012 serta untuk mengkaji secara komperhensif, dan mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam Perspektif *good governance*.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menggunakan pendekatan pada kenyataan yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari responden atau obyek yang diteliti, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen tertulis, arsip maupun yang lainnya pada instansi yang berhubungan dengan penelitian.

Hasil penelitian ini telah menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Baubau dalam Perspektif *Good Governance* belum dapat terlaksana secara optimal, hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor yang disinyalir mempengaruhi proses implementasi kebijakan IMB di Kota Baubau diantaranya faktor komunikasi yaitu kurangnya komunikasi antar pelaksana program dengan para kelompok sasaran (*target group*) dan instansi terkait dalam pengurusan IMB masih sangat kurang, faktor sumber daya manusia yaitu kualitas dan kuantitas sumber daya finansial yang menjamin keberlangsungan program/kebijakan belum mencukupi, faktor Disposisi yaitu tanggung jawab dan keterbukaan pemda dalam kebijakan IMB masih sangat rendah, dan faktor struktur organisasi yaitu struktur organisasi pelaksanaan pelayanan IMB yang berbelit-belit serta tidak adanya standar operating procedur (SOP). Sedangkan rekomendasi penulis dalam penelitian ini adalah agar pemerintah dapat merampingkan struktur birokrasi yang kaya fungsi namun miskin struktur sehingga pengurusan IMB oleh masyarakat tidak berbelit-belit serta lebih transparan dalam melaksanakan kebijakan yang telah ada.

Kata Kunci : Implementasi kebijakan IMB, *Good Governance*

ABSTRACT

Implementation of the decentralization system that emphasizes local autonomy perinsip has demanded all parties to be able to make changes in all sectors. Regional autonomy has also given substantial powers for the regions to organize and take care of their own regions so in governance at the local government areas are required to carry out the functions, roles and responsibilities well. As an autonomous region, Baubau City Government also seeks to improve the progress of the region through the implementation of development activities planned and measured.

The issues raised in this study is how the policy implementation of the building permit (IMB) at City Baubau in Perspective 2012 Good Governance year and whether the factors that influence policy implementation Building Permit (IMB) at City Baubau, while the purpose of this study is to determine the extent of Policy Implementation Building Permit (IMB) at City Baubau the perspective of good governance in 2012 as well as to assess comprehensively, and reveals the factors that influence building permit (IMB) in the perspective of good governance.

The method used in this study is a qualitative descriptive approach is to use the fact that the primary data and secondary data. The primary data source is the source of the data obtained directly from respondents or objects under study, while the secondary data source is the source of the data obtained through written documents, archives and other institutions related to the study.

The results of this study have been menunjukkan that Policy Implementation Building Permit (IMB) at City Baubau the Perspective of Good Governance can not be implemented in optimal, this is due to the factors that presumably influence the process of policy implementation in the City Baubau IMB communication factors which include lack of communication between implementing program with the target group (group targets) and related agencies in the maintenance of the IMB is still lacking, the human factor is the quality and quantity of financial resources that ensure the sustainability of program / inadequate policies, disposition factors that responsibility and openness in local government IMB policy is still very low, and the factor structure of the organization, namely the implementation of the organizational structure of the IMB service convoluted and absence operating standard procedure, (SOP). While the authors of this research recommendation is for the government to streamline the bureaucratic structure rich but poor function struktur thus obtaining a building permit by masyarakat straightforward and transparent in implementing existing policies.

Keywords: Implementation of the IMB policies, good governance